

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang kaya akan protein nabati dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Keunggulan tersebut menjadikan komoditas ini sebagai bahan makanan yang banyak digemari oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein yang diperlukan oleh tubuh dalam melakukan aktivitas kehidupan. Tingginya kegemaran masyarakat terhadap konsumsi kedelai mengakibatkan tanaman palawija ini menjadi salah satu komoditas strategis dalam rencana aksi pemantapan ketahanan pangan yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian pada tahun 2005. Tercatat ada lima komoditas strategis yang menjadi fokus utama dalam membangun ketahanan pangan nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi.

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 % per tahun, menyebabkan konsumsi kedelai mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang tercatat dalam Buletin Konsumsi Pangan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tingkat konsumsi kedelai di Indonesia mencapai 2,2 juta ton per tahun. Adanya tingkat kebutuhan kedelai yang tinggi ini tidak diimbangi dengan produksi dalam negeri yang memadai. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa rata-rata produksi kedelai nasional dari tahun 2012-2014 hanya sebesar 848.160,3 ton yang didapatkan dari rata-rata luas panen sebesar 576.740,6 Ha. Hal ini menyebabkan Indonesia harus melakukan mekanisme impor untuk memenuhi kebutuhan domestik kedelai. Data statistik ekspor impor komoditas pertanian 2001-2013 menunjukkan bahwa kedelai merupakan komoditas impor yang mendominasi dibandingkan dengan komoditas pangan yang lain, dimana pada periode 2010-2013 nilai impor kedelai mencapai US\$ 4,63 Miliar dengan volume impor sebesar 7,84 Juta ton. Ketergantungan terhadap impor kedelai merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan Indonesia, seperti yang dirasakan pada saat melonjaknya harga kedelai yang mencapai dua kali lipat pada tahun 2008 akibat berkurangnya pasokan kedelai di pasar Internasional (Supadi, 2009).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat produksi kedelai paling tinggi diantara provinsi yang lain. Pada periode

2012-2014 tercatat rata-rata produksi kedelai per tahun di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 341.397,3 ton dengan luas area panen sebesar 211.725 ha/tahun dan nilai produktivitasnya adalah 16,12 Ku/Ha. Nilai produksi tertinggi kemudian diikuti oleh lima provinsi lain yang ada di Indonesia. Adapun data perkembangan produksi kedelai berdasarkan provinsi pada periode 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Produksi Kedelai Periode 2012-2014 Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/ Ha)	Produksi (Ton)
Jawa Timur	211.725	16,12	341.397,3
Jawa Tengah	79.511,6	15,95	126.944,3
Daerah Istimewa			
Yogyakarta	22.767,6	12,7	89.216,3
Nusa Tenggara Barat	72.949,6	11,6	83.968
Jawa Barat	45.380	15,13	68.875,6
Aceh	36.499,6	14,6	53.574,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014.

Nilai produksi kedelai di Provinsi Jawa Timur terbilang tinggi dibandingkan dengan produksi kedelai di provinsi lain namun angka tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan kedelai masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari statistik ekspor impor kedelai Jawa Timur yang masih terbilang tinggi. Data perkembangan impor komoditas kedelai Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Impor Komoditas Kedelai Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2014

Tahun	Volume (Kg)	Nilai (US \$)
2012	188.569.092,9	104.171.157,3
2013	171.461.659,4	97.182.049,17
2014	206.320.452,2	122.387.878,7

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, 2012-2014.

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, perkembangan impor komoditas kedelai dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 volume impor mengalami penurunan sebesar 9% dimana pada tahun 2012 volume impor kedelai adalah sebesar 188.569.092,9 Kg menjadi sebesar 171.461.659,4 dan penurunan nilai impor adalah sebesar 6,7% dari US\$ 104.171.157,3 menjadi US\$ 97.182.049,17. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya penurunan volume impor ini diperkirakan sebagai dampak turunnya

volume impor kedelai dari Amerika Serikat ke Indonesia, hal ini mengingat negara tersebut merupakan produsen kedelai terbesar di dunia dan juga berperan sebagai importir kedelai terbesar di Indonesia. Tercatat pada tahun 2012 volume impor kedelai dari Amerika Serikat adalah sebesar 2,1 Juta ton sedangkan pada tahun 2013 impor kedelai dari Amerika Serikat hanya sebesar 1,7 juta ton. Perkembangan pada tahun berikutnya Amerika Serikat kembali meningkatkan volume impornya ke Indonesia sehingga pada tahun 2014 jumlah kedelai impor di Provinsi Jawa timur juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode 2014 ini peningkatan volume impor komoditas kedelai adalah sebesar 20,3% dari angka 171.461.659,4 Kg menjadi US\$ 206.320.452,2 dan peningkatan nilai impornya adalah sebesar 25,9% dari angka US\$ 97.182.049,17 menjadi US\$ 122.387.878,7.

Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa daerah yang menjadi sentra usaha tani kedelai. Salah satu daerah yang masuk ke dalam daftar produsen kedelai terbesar di Jawa timur adalah Kabupaten Sampang. Berdasarkan data dari buku Jawa Timur Dalam Angka tahun 2014 menunjukkan bahwa Kabupaten Sampang menyumbang produksi kedelai di Jawa Timur sebesar 41.166 Ton, hal ini sekaligus menempatkan Kabupaten Sampang sebagai daerah produsen kedelai terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi yang menyumbang produksi kedelai di Jawa Timur sebesar 55.116 Ton. Meskipun Kabupaten sampang bukan merupakan daerah dengan produksi tertinggi, namun daerah ini memiliki tingkat produktivitas kedelai tertinggi yaitu sebesar 16,77 Ku / Ha dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi yang hanya memiliki tingkat produktivitas sebesar 16,71 Ku/ Ha. Tingkat produktivitas yang relatif tinggi ini menjadikan Kabupaten Sampang sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam proses pengembangan usaha tani kedelai di Jawa Timur.

Menurut Irwan (2013) kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang strategis setelah padi dan jagung. Sifat strategis ini dikarenakan komoditas kedelai berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini menyebabkan ada beberapa intervensi dari pemerintah untuk tetap menjaga ketersediaan komoditas kedelai untuk memenuhi permintaan salah satu tanaman palawija ini. Pada era 1998 sebelum terjadi krisis moneter kegiatan tata niaga impor kedelai masih dikendalikan oleh Bulog yang berfungsi sebagai importir kedelai. Namun, setelah Indonesia mengalami krisis moneter kegiatan tata niaga impor kedelai

dibuka untuk umum oleh pemerintah sehingga importir umum bebas melakukan aktivitas impor komoditas kedelai.

Peraturan pemerintah yang erat kaitannya dengan aktivitas impor komoditas kedelai adalah pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Berdasarkan peraturan Menteri keuangan Nomor 213 / PMK.001 / 2011 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, telah ditetapkan bea masuk terhadap impor barang berupa kacang kedelai dengan pos tarif (HS) 1201.90.00.00 sebesar 5% (Lima persen). Namun seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan aktivitas usaha tani komoditas kedelai di Indonesia, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan peraturan pembebanan tarif bea masuk kedelai. Tarif bea masuk kedelai yang awalnya sebesar 5% diubah menjadi sebesar 0% atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 / PMK.011/ 2013.

Pembebanan tarif impor kedelai sebesar 0% ini merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi hambatan perdagangan antar negara (*Free Trade*). Agar bisa bersaing dengan produk kedelai impor, maka kegiatan usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang harus bisa bersiaga untuk menghadapi persaingan dengan kedelai dari luar negeri. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam aktivitas usaha tani kedelai, kebijakan tersebut bukan hanya berupa kebijakan tarif bea masuk impor akan tetapi terdapat juga beberapa kebijakan pemerintah yang erat kaitannya dengan aktivitas usaha tani kedelai. Adapun kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi aktivitas usaha tani kedelai adalah berupa kebijakan harga *input* usaha tani kedelai berupa subsidi dan juga kebijakan harga *output* usaha tani kedelai berupa ketetapan harga pembelian kedelai di tingkat petani. Seiring dengan perkembangan aktivitas usaha tani kedelai, maka terdapat beberapa penyesuaian pada kebijakan-kebijakan tersebut. Adanya penyesuaian kebijakan tersebut akan memberikan dampak pada aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.

Selain dengan jalan impor, alternatif pemenuhan kebutuhan kedelai adalah dengan memproduksi kedelai sendiri. Jika dalam pelaksanaan usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang memiliki daya saing baik kompetitif maupun komparatif dalam memproduksi kedelai, maka secara teoritis akan lebih efisien apabila Kabupaten Sampang memproduksi sendiri kedelai untuk memenuhi permintaan

masyarakat terhadap komoditas kedelai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan suatu kajian untuk memperoleh informasi dampak kebijakan pemerintah terhadap efisiensi dan daya saing usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tingkat profitabilitas, efisiensi serta dampak kebijakan pemerintah terhadap aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat profitabilitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.
2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.
3. Untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui tingkat profitabilitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.
2. Dapat mengetahui tingkat efisiensi usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.
3. Dapat mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.
4. Dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas usaha tani pada komoditas kedelai.